

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam suatu wilayah. APBD mencakup sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBD merupakan hal penting dalam manajemen keuangan daerah, dan penyusunannya dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Dalam rancangan keuangan pemerintah daerah perlu disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasar peraturan Daerah karena lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pembangunan di tingkat Lokal. Dalam mengurus anggaran daerah, Pemerintah Daerah dibantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membuat serta merealisasikan anggaran yang sudah di bentuk.

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memiliki susunan pemerintahan yang bertujuan untuk membangun suatu daerah agar lebih baik lagi, suatu daerah tidak akan bisa berjalan apabila tidak melibatkan beberapa instansi guna membantu merealisasikan program-program di suatu daerah. Salah satu wilayah di Jawa Timur yaitu Kota Madiun yang di pimpin oleh Bapak Walikota Madiun yaitu Drs. H. Maldi SH, MM, M.Pd beserta Wakil Walikota Ibu Inda Raya Ayu Miko Saputri SE. MIB. Adapula visi misi yang ditetapkan, yaitu memiliki visi yang terfokuskan untuk masyarakat yang sejahtera, sedangkan untuk misi Kota Madiun bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas (Pemerintah Kota Madiun, 2022). Dengan visi misi tersebut di salurkan melalui program-program yang dapat mengembangkan Kota Madiun menjadi kota yang lebih baik lagi. Dalam menjalankan program-

program tersebut, pemerintah membutuhkan bantuan instansi-intansi setiap penjurur kota.

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memiliki beberapa jenis yaitu dibidang dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, badan penanggulangan bencana daerah, dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pangan, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas perhubungan, dinas komunikasi informatika dan statistik, dinas koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kearsipan dan perpustakaan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pemuda olahraga dan parawisata, dinas pertanian, dinas peternakan dan kesehatan hewan (sumbawakab,2023). Salah satu instansi yang dapat berpengaruh pada pemerintahan kota dalam pelayanan publik yaitu Kecamatan yang berada dibawah naungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Kota madiun memiliki 3 (tiga) kecamatan, salah satunya kecamatan Taman (Bpk.go.id 2022).

Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di bidang pelayanan publik yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Setiap OPD memiliki program-program yang harus dilaksanakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan program tersebut, OPD memerlukan perencanaan keuangan, yang dapat disebut sebagai penganggaran. Penganggaran merupakan aktivitas penting dalam suatu organisasi dengan adanya penganggaran OPD dapat membangun kualitas masyarakat hingga pembangunan suatu daerah tertentu. Anggaran yang telah disusun harus terealisasikan guna mengukur kinerja suatu organisasi. Menurut Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003 tentang “fungsi APBN dan APBD memiliki fungsi yaitu, otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”.

Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Madiun (PEMKOT) yang tugas dan fungsinya berdasarkan dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan”. Pemerintah Kecamatan Taman Kota Madiun merupakan OPD yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kecamatan Taman Kota Madiun ini memiliki karyawan yang berjumlah 26 orang dengan 5 (lima) kasi atau disebut dengan divisi yang berbeda selain Camat dan juga Sekretaris Camat, 5 (lima) kasi tersebut terdiri atas kasi pemerintahan, kasi pemberdayaan masyarakat, kasi pembangunan, kasi ketentraman dan ketertiban umum serta kasi kesejahteraan sosial, di mana masing-masing kasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Terdapat juga 2 (dua) sub bagian terdiri dari bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan dan kepegawaian.

Peraturan Wali Kota Pasal 9 Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat “(1) mengenai peraturan dan tugas bagian Umum dan Keuangan antara lain melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.” Berdasarkan beberapa kasi di atas dapat menimbulkan suatu perencanaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun. Oleh karena itu, anggaran yang diajukan akan terealisasi berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun. Setiap tahun Kecamatan Taman Kota Madiun menyusun anggaran yang akan diajukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Tahap perencanaan dan penganggarn APBD di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat permasalahan terkait proses perencanaan dan penganggaran, masalah yang dari tahun ke tahun seringkali berulang yang berpotensi merugikan masyarakat, maka seharusnya menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah daerah. Proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kendala sejak tahapan Musrenbang, peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah, proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS), proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), pembahasan anggaran dengan pihak DPRD dan penetapan anggaran APBD. Secara mekanisme, tahapan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi proses yang panjang mulai dari musyawarah pembangunan di tingkat desa dari bulan Januari, penetapan Rencana Kerja Tahunan pada bulan Mei, penyusunan usulan anggaran bulan Agustus, sampai dengan penetapan APBD sendiri pada bulan Desember. Pada bulan Mei hasil dari musrenbang belum disepakati karena hasil dari reses anggota DPRD dan audiens bupati tidak mendapatkan perhatian serius yang mengakibatkan perencanaan kegiatan mengalami tarik ulur yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD (Papatungan, Ilat and Morasa, 2017).

Permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempengaruhi siklus perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Kota Madiun.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah yang diambil adalah bagaimana proses penganggaran di Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu di Kasubag Umum dan Keuangan Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada proses penganggaran di Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penganggaran di Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun. Melalui penelitian ini, penulis dapat mempelajari secara langsung proses penganggaran yang ada di organisasi pemerintah daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademik sebagai berikut:

1. Memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki topik penelitian sejenis.
2. Memberikan tambahan pengetahuan terkait proses penganggaran perusahaan, khususnya pada Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian penulis, penelitian terdahulu dan rerangka konseptual

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, konsep operasional, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran objek penelitian, hasil analisis data berupa proses penganggaran Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun), dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan analisa bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya serta bagi organisasi public.